

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH: QRIS DAN GPN DALAM KONTEKS NEGOSIASI TARIF TRUMP

Ikhwan Fikri¹

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

Holijah²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

Mohammad Syawaludin³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

Email: ¹ikhwanfikri_uin@radenfatah.ac.id, ²holijah_uin@radenfatah.ac.id, ³Mohammad Syawaludin_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of tariff policies implemented by President Trump on digital payment systems in Indonesia, especially QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) and GPN (Global Payment Network). This type of research is qualitative with data processing techniques through descriptive analysis. The results of the study indicate that the application of the principle of masalah mursalah in the context of tariff negotiations can have a positive impact on the Indonesian economy. QRIS and GPN play an important role in supporting economic and financial stability amidst global uncertainty caused by tariff policies. The latest data shows that in the first quarter of 2025, the number of QRIS users reached 56.3 million with a transaction volume of 2.6 billion, while GPN recorded digital transactions reaching 10.76 billion, growing 33.50%.

Keywords: Tariff Policy, QRIS, GPN, Masalah Mursalah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump terhadap sistem pembayaran digital di Indonesia, khususnya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Global Payment Network). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengolahan data melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip masalah mursalah dalam konteks negosiasi tarif dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. QRIS dan GPN berperan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan di tengah ketidakpastian global yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif. Data terbaru menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 56,3 juta dengan volume transaksi 2,6 miliar, sementara GPN mencatat transaksi digital mencapai 10,76 miliar, tumbuh 33,50%.

Kata Kunci: Kebijakan Tarif, QRIS, GPN, Masalah Mursalah.

PENDAHULUAN

QRIS, atau Quick Response Code Indonesian Standard, merupakan sistem pembayaran berbasis kode QR yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. Tujuan utama dari implementasi QRIS adalah untuk memfasilitasi transaksi non-tunai di seluruh Indonesia dengan cara yang lebih efisien dan aman. Dengan QRIS, pengguna dapat melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi dompet digital yang telah terintegrasi. Menurut data dari Media InterActive QRIS, pada juni tahun 2025, penggunaan QRIS telah meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 15,7 juta merchant yang sudah tercatat bergabung menggunakan pembayaran QRIS¹.

Statistik menunjukkan bahwa penggunaan QRIS tidak hanya terbatas pada transaksi ritel, tetapi juga merambah ke sektor-sektor lain seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa QRIS telah menjadi solusi yang relevan dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan bahwa QRIS berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mempercepat proses transaksi².

Dalam konteks global, QRIS juga dapat dilihat sebagai bagian dari tren pembayaran digital yang sedang berkembang di seluruh dunia. Menurut laporan dari Statista, nilai transaksi pembayaran digital global diperkirakan mencapai USD 6,7 triliun pada tahun 2023, dengan pertumbuhan yang didorong oleh adopsi teknologi keuangan (fintech) dan perubahan perilaku konsumen (Statista, 2023). Oleh karena itu, pemahaman tentang QRIS dalam konteks ini sangat penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan posisinya dalam pasar global. Selain itu, dalam konteks negosiasi tarif yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, penting untuk mempertimbangkan bagaimana sistem pembayaran seperti QRIS dapat mempengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan AS. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump, yang sering kali dianggap proteksionis, dapat berdampak pada sektor-sektor yang mengadopsi teknologi pembayaran digital. Misalnya, sektor e-commerce dan fintech di Indonesia mungkin menghadapi tantangan baru jika tarif impor barang dan jasa dari AS meningkat³.

¹ InterActive QRIS, "QRIS - Proses Step by Step Mendapatkan QRIS Dari Registrasi Sampai Cetak QRIS," June 21, 2025, <https://qris.interactive.co.id/homepage/qris-proses-step-by-step?lang=id>.

² Muchammad Milladi Andhika, Mintarti Ariani, and Bambang Budiarto, "Tantangan Perkembangan Teknologi melalui Metode Pembayaran QRIS bagi UMKM dan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 9, no. 1 (March 15, 2025): 1522–39, <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5233>.

³ Agustina Purwanti, "QRIS dalam Sorotan Negosiasi Tarif Trump, Akankah Indonesia Mengalah?," Kompas.id, April 23, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/qris-dalam-sorotan-negosiasi-tarif-trump-akankah-indonesia-mengalah>.

Dengan demikian, analisis mengenai QRIS dan dampaknya dalam konteks negosiasi tarif Trump menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri dan teknologi keuangan saling berinteraksi. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas lebih lanjut tentang QRIS, Global Payment Network (GPN), serta implikasi dari negosiasi tarif yang dilakukan oleh Trump terhadap kedua sistem ini. Dalam era digital saat ini, sistem pembayaran telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama di Indonesia dengan diperkenalkannya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). GPN bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran yang ada di Indonesia, sehingga memudahkan transaksi keuangan bagi masyarakat. Dengan adanya GPN, diharapkan akan tercipta efisiensi dalam sistem pembayaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut data InterActive QRIS, pada periode maret tahun 2025, transaksi menggunakan QRIS berhasil menembus angka Rp. 262,1 triliun atau meningkat sebesar 169% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap sistem pembayaran digital⁴.

Di sisi lain, dalam konteks global, negosiasi tarif yang dilakukan oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump seringkali menyebabkan ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis bagaimana GPN dan QRIS dapat berperan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang disebabkan oleh kebijakan tarif tersebut. Melalui pendekatan masalah mursalah, kita dapat mengeksplorasi potensi manfaat dari penerapan sistem pembayaran ini dalam konteks negosiasi tarif internasional. GPN sebagai infrastruktur pembayaran nasional diharapkan dapat menjembatani berbagai layanan pembayaran yang ada, dari bank hingga penyedia layanan keuangan non-bank. Dengan adanya GPN, transaksi antar penyedia layanan pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi⁵. QRIS, sebagai standar kode QR yang disusun oleh Bank Indonesia, juga berkontribusi dalam mempermudah transaksi. Dengan QRIS, pengguna cukup menggunakan satu kode QR untuk berbagai platform pembayaran, sehingga mengurangi kompleksitas yang ada sebelumnya. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), lebih dari 60%

⁴ InterActive QRIS, "Ditekan AS, Transaksi QRIS Ternyata Meroket 169%! Bukti Ketangguhan Ekonomi Digital Indonesia," April 24, 2025, <https://qris.interactive.co.id/homepage/blog-detail?lang=en&page=OTQ=-ditekan-as-transaksi-qris-ternyata-meroket-169%-bukti-ketangguhan-ekonomi-digital-indonesia>.

⁵ *Apa Itu Sistem Pembayaran GPN? Ini Kelebihan dan Kekurangannya*, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NlEC805R-apa-itu-sistem-pembayaran-gpn-ini-kelebihan-dan-kekurangannya>.

responden menyatakan bahwa kemudahan penggunaan QRIS menjadi salah satu alasan utama mereka beralih ke pembayaran digital⁶.

Dalam konteks negosiasi tarif Trump, penerapan GPN dan QRIS dapat menjadi alat strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional. Dengan mengoptimalkan sistem pembayaran domestik, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar global. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana kedua sistem ini dapat berkontribusi terhadap masalah mursalah, yaitu upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dalam konteks ekonomi dan perdagangan internasional.

Negosiasi tarif internasional telah menjadi isu sentral dalam hubungan ekonomi global, terutama di era kepemimpinan Donald Trump. Dalam periode ini, Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksionisme yang agresif, yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan pembayaran digital. Salah satu inovasi yang muncul di Indonesia adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), sebuah standar pembayaran berbasis QR yang bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan. Di sisi lain, Global Payment Network (GPN) juga berkembang sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi lintas negara. Dalam konteks ini, analisis masalah mursalah menjadi penting untuk mengevaluasi manfaat dan dampak dari kedua inovasi ini dalam menghadapi dinamika negosiasi tarif yang dipicu oleh kebijakan Trump.

Konteks negosiasi tarif di bawah kepemimpinan Trump ditandai dengan kebijakan "America First" yang mengedepankan kepentingan nasional di atas kerjasama internasional. Menurut data dari Office of the United States Trade Representative, selama tahun 2018, Trump memberlakukan tarif tambahan sebesar 25% terhadap barang-barang dari Tiongkok senilai \$50 miliar, yang berdampak luas pada rantai pasok global⁷. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi hubungan dagang AS dengan Tiongkok, tetapi juga berdampak pada negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, QRIS dan GPN dapat dilihat sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di Indonesia untuk tetap kompetitif di pasar global yang semakin ketat.

QRIS, sebagai standar pembayaran yang terintegrasi, memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengakses pasar yang lebih luas tanpa harus bergantung pada sistem pembayaran tradisional yang sering kali mahal dan rumit. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga menciptakan peluang

⁶ Keterbatasan Infrastruktur Jadi Tantangan Pengembangan Transaksi QRIS, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrJvg-keterbatasan-infrastruktur-jadi-tantangan-pengembangan-transaksi-qr-is>.

⁷ Kilas Balik Perang Dagang Pertama Trump dan Kenapa Dianggap Gagal, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCg6wM-kilas-balik-perang-dagang-pertama-trump-dan-kenapa-dianggap-gagal>.

baru bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan kebijakan perdagangan internasional yang berubah-ubah.

Sementara itu, GPN berfungsi untuk menghubungkan berbagai sistem pembayaran di seluruh dunia, sehingga memfasilitasi transaksi internasional dengan lebih efisien. Dalam konteks negosiasi tarif, GPN dapat membantu mengurangi biaya transaksi yang sering kali menjadi beban bagi pelaku usaha ketika berhadapan dengan tarif yang tinggi. Dengan adanya GPN, pelaku usaha dapat lebih mudah melakukan transaksi lintas negara, meskipun tarif yang dikenakan mungkin tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa inovasi dalam sistem pembayaran dapat menjadi alat strategis dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan proteksionis. Dalam analisis ini, penulis akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai masalah mursalah yang terkandung dalam implementasi QRIS dan GPN, serta bagaimana kedua sistem ini dapat berkontribusi dalam memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi tarif internasional di era kepemimpinan Trump. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya inovasi teknologi dalam konteks ekonomi global yang terus berubah.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital dan kebijakan perdagangan internasional, penelitian mengenai QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Global Payment Network) semakin relevan. QRIS, yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, bertujuan untuk mempermudah transaksi digital di Indonesia dengan menyediakan standar QR code yang dapat digunakan oleh berbagai platform pembayaran. Sementara itu, GPN berfungsi sebagai jaringan pembayaran yang mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran lokal untuk memfasilitasi transaksi yang lebih efisien. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nugrah Leksono Putri Handayani (2023), telah membahas Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan⁸, namun belum banyak yang meneliti bagaimana kedua sistem ini berinteraksi dalam konteks negosiasi tarif perdagangan internasional, khususnya dalam hubungan dengan kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump.

Studi oleh Muhammad dan Vanessa (2025) menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump berdampak signifikan pada hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Penelitian mereka menyoroti bagaimana kebijakan tersebut menciptakan ketidakpastian dalam pasar global dan mempengaruhi

⁸ Nugrah Leksono Putri Handayani, "Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 1, no. 3 (September 30, 2023): 363–70, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.752>.

keputusan investasi⁹. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik mengaitkan dampak kebijakan tarif dengan perkembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan GPN. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana QRIS dan GPN dapat mempengaruhi negosiasi tarif dalam konteks kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Trump. Lebih lanjut, penelitian oleh Suryanto dan Ratna (2025) mengungkapkan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi biaya¹⁰. Namun, belum ada penelitian yang secara langsung mengaitkan efisiensi ini dengan negosiasi tarif yang dilakukan oleh negara, khususnya dalam konteks kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh pemerintahan Trump. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana QRIS dan GPN dapat menjadi alat untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi tarif internasional, serta bagaimana kebijakan tarif tersebut dapat mempengaruhi adopsi teknologi pembayaran digital di negara berkembang. Dalam konteks ini, penelitian ini juga akan membahas bagaimana masalah mursalah, atau manfaat yang tidak secara eksplisit diatur dalam syariat, dapat diterapkan dalam analisis sistem pembayaran digital. Masalah mursalah dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi kebijakan yang mendukung penggunaan QRIS dan GPN dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara teknologi pembayaran digital dan kebijakan perdagangan internasional, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memanfaatkan potensi ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dari QRIS dan GPN, tetapi juga mengkaji implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas, serta bagaimana kedua sistem ini dapat berkontribusi terhadap kebijakan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur yang ada dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut di bidang ini. Dalam era globalisasi, kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Donald Trump tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga berdampak pada sistem pembayaran digital di Indonesia seperti QRIS dan GPN. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip masalah mursalah dapat diterapkan untuk menjamin kemaslahatan umum dalam merespons kebijakan tersebut. Fokus penelitian meliputi tiga hal utama: dampak tarif Trump

⁹ Muhammad Sultan Mandalika and Vanessa Debora Muaja, "Analisis Hukum terhadap Dampak Pengenaan Tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap Perdagangan Indonesia : Tinjauan Perjanjian Perdagangan Internasional dan Kebijakan Ekonomi," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (April 14, 2025): 173–87, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1285>.

¹⁰ Suryanto Suryanto and R. Ratna Meisa Dai, "Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi," *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 13, no. 1 (May 9, 2025): 96–110, <https://doi.org/10.34010/hnta2869>.

terhadap pembayaran digital di Indonesia, implikasi penerapan masalah mursalah dalam negosiasi tarif, serta peran QRIS dan GPN dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini akan mengkaji data dan statistik terbaru mengenai penggunaan QRIS dan GPN, serta dampak kebijakan tarif terhadap ekonomi digital di Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 56,3 juta, dengan volume transaksi mencapai 2,6 miliar. Merchant yang menggunakan QRIS juga terus bertambah, mencapai 38,1 juta¹¹, menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap inovasi dalam sistem pembayaran. Selain itu, Global Payment Network (GPN) juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, pada kuartal I 2025, volume transaksi pembayaran digital mencapai 10,76 miliar transaksi, tumbuh 33,50%¹².

Dalam konteks masalah mursalah, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Misalnya, dengan adanya QRIS dan GPN, biaya transaksi dapat ditekan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Penelitian oleh Berliana, Aura dan Aisyah (2024) menunjukkan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital seperti QRIS dapat mengurangi biaya transaksi hingga 50%, memberikan keuntungan yang nyata bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia¹³. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi baru. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa meskipun adopsi teknologi pembayaran meningkat, isu keamanan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan tarif yang diambil oleh Trump dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap teknologi pembayaran dan bagaimana hal ini berhubungan dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan pada kepentingan umum.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah mursalah dalam konteks penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Gerakan Nasional Non-Tunai) dalam negosiasi tarif yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Dalam era digital yang semakin berkembang, adopsi teknologi pembayaran seperti QRIS menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan

¹¹ InterActive QRIS, "Jadi CATATAN Amerika, QRIS Justru Semakin Menggila," Mei 2025, <https://qris.interactive.co.id/homepage/blog-detail?lang=id&page=MTM0&jadi-catatan-amerika-qris-justru-semakin-menggila>.

¹² Retno Sulistyawati, "Pemerintah Diminta Tidak Menuruti Protes AS soal Penggunaan QRIS | tempo.co," Tempo, Mei | 18.00 WIB 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-diminta-tidak-menuruti-protes-as-soal-penggunaan-qris-1334472>.

¹³ Aura Permata Putri Berliana Simanjuntak, "Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Dalam Mendukung Penjualan di Era Digital," November 20, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14192809>.

inklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana QRIS dan GPN dapat berkontribusi pada ekonomi digital Indonesia serta dampaknya terhadap negosiasi tarif internasional.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan antara kebijakan pembayaran digital dan negosiasi tarif yang dilakukan oleh negara-negara, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Dalam hal ini, masalah mursalah sebagai prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan umum akan menjadi landasan dalam mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut¹⁴. Dengan mengidentifikasi potensi keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari implementasi QRIS dan GPN, penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan di Indonesia. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan QRIS meningkat signifikan sejak diperkenalkan pada tahun 2019, dengan lebih dari 15,7 juta pengguna aktif pada juni tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap penggunaan teknologi pembayaran digital, yang dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi transaksi dan pengurangan biaya. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana QRIS dan GPN dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi tarif internasional, terutama dalam menghadapi kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga akan mengkaji contoh kasus negara-negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan sistem pembayaran digital dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi negosiasi tarif mereka. Misalnya, negara-negara Skandinavia yang telah menerapkan sistem pembayaran digital secara luas dan bagaimana hal tersebut berdampak pada daya saing mereka di pasar internasional. Dengan menganalisis berbagai data dan statistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi QRIS dan GPN dalam konteks negosiasi tarif internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi, artikel ilmiah, dan statistik dari lembaga terkait. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan pembayaran digital di Indonesia serta meningkatkan daya saing negara di kancah internasional.

Dalam era globalisasi, interaksi ekonomi antar negara semakin kompleks, terutama dalam konteks negosiasi tarif yang dipimpin oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Salah satu fenomena yang menarik untuk dianalisis adalah implementasi Quick Response Code Indonesia Standard

¹⁴ Muhammad Rehan Sri Astuti, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer," October 25, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13990431>.

(QRIS) dan Global Payment Network (GPN) dalam konteks negosiasi tarif yang dilakukan oleh mantan Presiden Donald Trump. Makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dengan menganalisis bagaimana QRIS dan GPN dapat berfungsi sebagai instrumen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam negosiasi tarif, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan negara mitra dagangnya.

QRIS, yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi digital yang lebih cepat dan aman. Menurut data InterActive QRIS, pada periode maret tahun 2025, transaksi menggunakan QRIS berhasil menembus angka Rp. 262,1 triliun atau meningkat sebesar 169% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi alat yang penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan di Indonesia, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi tarif internasional. Di sisi lain, GPN sebagai jaringan pembayaran global juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan akses pasar internasional. Dengan adanya GPN, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia dapat lebih mudah untuk melakukan transaksi internasional tanpa harus bergantung pada sistem pembayaran konvensional yang sering kali memakan waktu dan biaya tinggi. Statistik menunjukkan bahwa UKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga peningkatan akses pasar ini sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional¹⁵.

Dalam konteks negosiasi tarif, penggunaan QRIS dan GPN dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi Indonesia. Dengan mempermudah transaksi dan mengurangi biaya, Indonesia dapat menawarkan harga yang lebih bersaing kepada negara mitra dagangnya. Misalnya, dalam negosiasi dengan negara-negara ASEAN, kemampuan untuk melakukan transaksi yang cepat dan efisien dapat menjadi faktor penentu dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Oleh karena itu, makalah ini akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana QRIS dan GPN dapat diintegrasikan dalam strategi negosiasi tarif yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya inovasi teknologi dalam konteks ekonomi global, serta menunjukkan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi pada literatur yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha di Indonesia.

¹⁵ Benny Eko Supriyanto, "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi lewat KUR dan Insentif UMKM," December 9, 2024, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>.

Bagian metodologi harus menjelaskan bagaimana penulis menjawab pertanyaan penelitian. Bagian ini menguraikan pendekatan, strategi, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Bagian ini harus mencakup deskripsi terperinci tentang desain penelitian, metode pengumpulan data, dan alat analisis yang digunakan untuk memastikan bahwa penelitian menjawab rumusan masalah secara efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Global Payment Network) dalam konteks kebijakan tarif yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini mampu mengungkap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi secara lebih komprehensif, sehingga memberikan ruang untuk mengeksplorasi interaksi yang kompleks antara kebijakan tarif global dengan perkembangan inovasi keuangan digital di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif efektif untuk menggali makna, pengalaman, serta interpretasi individu dalam kerangka sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk memahami implikasi kebijakan internasional terhadap adopsi dan peran teknologi sistem pembayaran digital di Indonesia¹⁶.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan *Masalah Mursalah* dalam konteks QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan GPN (*Gerakan Nasional Non-Tunai*) yang dipengaruhi oleh kebijakan tarif internasional mantan Presiden AS, Donald Trump. Studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif dan kontekstual mengenai dinamika kebijakan tarif global terhadap sistem pembayaran digital di Indonesia. QRIS, diluncurkan Bank Indonesia pada 2019, bertujuan memudahkan transaksi non-tunai melalui satu kode QR, sementara GPN mendukung gerakan transaksi non-tunai untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi ekonomi. Penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan tarif proteksionis, seperti tarif tinggi terhadap produk China, memengaruhi ekonomi global dan berdampak pada sistem pembayaran Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari laporan perdagangan internasional, artikel jurnal, serta publikasi resmi seperti laporan WTO yang menegaskan potensi gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya akibat kebijakan proteksionis¹⁷. Melalui

¹⁶ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition (Los Angeles, 2018).

¹⁷ Agung Kwartama et al., "Implikasi Pembatasan Global Pada Jaringan Transportasi Laut dan Logistik Dalam Perdagangan Internasional di Indonesia: Implications of Global Restrictions on

pendekatan studi kasus ini, peneliti juga akan melakukan analisis terhadap dampak kebijakan tarif Trump terhadap sektor-sektor tertentu di Indonesia, seperti industri manufaktur dan perdagangan. Dalam hal ini, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan digunakan untuk menggambarkan tren perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sebelum dan setelah penerapan tarif tersebut. Misalnya, kebijakan tarif impor Trump berdampak pada Indonesia dengan meningkatkan bea masuk hingga 12% untuk produk ekspor Indonesia seperti tekstil, alas kaki, karet, dan furnitur. Ini menyebabkan kenaikan biaya produksi, penurunan volume ekspor, serta gangguan dalam rantai pasok dan prosedur kepabeanan¹⁸. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai interaksi antara kebijakan tarif internasional dan inovasi teknologi keuangan di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas implikasi dari Masalah Mursalah dalam konteks kebijakan publik, serta bagaimana QRIS dan GPN dapat berkontribusi pada perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan global.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pakar ekonomi dan teknologi, termasuk akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam pengembangan QRIS dan GPN. Wawancara semi-terstruktur dipilih untuk menggali perspektif mengenai dampak kebijakan tarif Donald Trump terhadap sistem pembayaran digital di Indonesia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tarif menimbulkan ketidakpastian, QRIS dan GPN tetap dipandang sebagai solusi efektif bagi pelaku usaha, khususnya UKM, karena kemudahan dan efisiensinya. Analisis kualitatif mengungkap bahwa kedua instrumen ini berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat sistem pembayaran nasional, sejalan dengan temuan Maharani et al. (2023) tentang peran inovasi pembayaran dalam meredam dampak kebijakan ekonomi global yang tidak menentu¹⁹.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang kompleks, khususnya dalam konteks negosiasi tarif yang dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri, seperti kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks dari data yang diperoleh, serta mengidentifikasi pola dan tema yang relevan. Dalam konteks QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN. Dalam menganalisis data, peneliti juga mempertimbangkan konteks

Maritime Transport and Logistics Networks in International Trade in Indonesia," *Jurnal Matemar : Manajemen dan Teknologi Maritim* 4, no. 2 (April 20, 2025), <https://doi.org/10.59225/6a0yk933>.

¹⁸ rexy, "Dampak Kebijakan Tarif Impor Trump Terhadap Ekspor Indonesia: Tantangan dan Solusi," *GRC Indonesia* (blog), May 10, 2025, <https://grc-indonesia.com/artikel/dampak-kebijakan-tarif-impor-trump-terhadap-ekspor-indonesia-tantangan-dan-solusi/>.

¹⁹ Dian Putri Maharani et al., "Pengaruh Digital Payment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kawasan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19," *Ecoplan* 6, no. 2 (October 30, 2023): 145–54, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i2.676>.

sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Misalnya, dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China dapat memengaruhi kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump dan, pada gilirannya, memengaruhi keputusan bisnis di Indonesia. Penelitian oleh Saeed (2023) menunjukkan bahwa ketegangan perdagangan internasional dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada investasi dan inovasi di negara-negara berkembang²⁰. Dari analisis yang dilakukan, kami juga mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi negosiasi tarif oleh pemerintahan Trump, seperti kebijakan ekonomi yang berlaku dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Data sekunder dari laporan Bank Dunia dan IMF tentang dampak kebijakan tarif terhadap negara-negara berkembang memberikan konteks tambahan yang penting. Misalnya, laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang terintegrasi dalam sistem pembayaran digital mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang masih bergantung pada metode pembayaran tradisional²¹.

Dalam rangka membandingkan efektivitas QRIS dan GPN dalam konteks negosiasi tarif, analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penggunaan QRIS dan kepuasan pengguna terhadap tarif yang dikenakan oleh GPN. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengguna yang beralih ke QRIS, semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka terhadap biaya transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kebijakan Tarif Trump Terhadap Sistem Pembayaran Digital di Indonesia (QRIS dan GPN)

Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sistem pembayaran digital di Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan transaksi yang lebih efisien adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Global Payment Network (GPN). Dalam konteks ini, kita perlu menganalisis bagaimana kebijakan tarif tersebut berpengaruh terhadap adopsi dan penggunaan kedua sistem ini di Indonesia.

²⁰ Saeed Ahmed, "REALISTIC VIEW ON TRADE WARS: US-CHINA TRADE CONFLICT & IMPACT ON EMERGING ECONOMIES," *Journal of Public Administration, Finance and Law* 29 (2023): 46–60, <https://doi.org/10.47743/jopaf1-2023-29-04>.

²¹ Dataxet Sonar, "Bank Tradisional di Era Digital: Menemukan Kekuatan Baru!," May 15, 2023, <https://sonarplatform.com/id/memuat-ulang-perbankan-bagaimana-bank-tradisional-beradaptasi-dengan-lanskap-digital/>.

Pada kuartal pertama tahun 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 56,3 juta dengan volume transaksi mencapai 2,6 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap inovasi dalam sistem pembayaran. QRIS sebagai sistem pembayaran yang terintegrasi memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan aman, yang sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dari kebijakan luar negeri, inovasi domestik dapat beradaptasi dan berkembang.

Sementara itu, GPN juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada kuartal pertama 2025, volume transaksi pembayaran digital melalui GPN mencapai 10,76 miliar transaksi, tumbuh sebesar 33,50% dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan memfasilitasi transaksi yang lebih efisien. Dalam konteks ini, kebijakan tarif Trump yang memicu ketidakpastian ekonomi global justru mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk mencari alternatif yang lebih efisien dan aman dalam bertransaksi, seperti penggunaan QRIS dan GPN. Contoh konkret dari dampak kebijakan tarif Trump dapat dilihat pada sektor perdagangan. Meningkatnya tarif impor barang dari China ke Amerika Serikat membuat banyak pelaku usaha di Indonesia mencari cara untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi. QRIS dan GPN menawarkan solusi yang tepat dengan memfasilitasi transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, meskipun ada tantangan dari kebijakan luar negeri, inovasi dalam sistem pembayaran digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan daya saing di pasar global²².

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun QRIS dan GPN menunjukkan pertumbuhan yang positif, tantangan tetap ada. Misalnya, masalah keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama dalam adopsi sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyedia layanan untuk terus meningkatkan infrastruktur keamanan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sistem pembayaran yang aman. Dalam konteks ini, masalah mursalah dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sistem pembayaran digital sambil tetap melindungi kepentingan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan tarif Trump telah memberikan dampak yang kompleks terhadap sistem pembayaran digital di Indonesia. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, inovasi seperti QRIS dan GPN telah menunjukkan bahwa sektor ini mampu beradaptasi dan berkembang. Dengan

²² Haris Firdaus, "Memahami Dampak Kebijakan Tarif Trump terhadap Perekonomian Indonesia," Kompas.id, April 9, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/memahami-dampak-kebijakan-tarif-trump-terhadap-perekonomian-indonesia>.

dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, sistem pembayaran digital di Indonesia berpotensi untuk terus tumbuh dan menjadi bagian penting dari ekonomi digital global.

Dampak dari penerapan masalah mursalah dalam konteks negosiasi tarif ini terhadap ekonomi Indonesia

Dalam konteks ekonomi Indonesia, penerapan prinsip masalah mursalah melalui inovasi sistem pembayaran seperti QRIS dan GPN memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Masalah mursalah, yang merupakan prinsip dalam hukum Islam yang mengedepankan kepentingan umum dan kebaikan masyarakat, memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan dan inovasi²³. Dengan meningkatnya jumlah pengguna QRIS yang mencapai 56,3 juta pada kuartal pertama tahun 2025, serta volume transaksi yang mencapai 2,6 miliar, kita dapat melihat bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap inovasi dalam sistem pembayaran.

Pertama, penerapan QRIS dan GPN dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan adanya QRIS, yang memungkinkan transaksi tanpa uang tunai, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan dapat lebih mudah berpartisipasi dalam ekonomi. Data menunjukkan bahwa merchant yang menggunakan QRIS mencapai 38,1 juta, yang mencerminkan adopsi yang luas di berbagai sektor, termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal ini sejalan dengan laporan dari World Bank yang menyatakan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% hingga 0,3% per tahun²⁴.

Kedua, pertumbuhan volume transaksi pembayaran digital yang mencapai 10,76 miliar dan tumbuh 33,50% pada kuartal pertama 2025 menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya pada sistem pembayaran digital. Kepercayaan ini sangat penting dalam konteks negosiasi tarif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam menghadapi tarif yang ditetapkan oleh negara lain, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Dengan meningkatnya volume transaksi, pemerintah dapat lebih mudah bernegosiasi dan mendapatkan posisi tawar yang lebih baik di kancah internasional²⁵.

²³ Neni Hardiati Ratna R, "Aplikasi Masalah Mursalah dalam Perekonomian Islam serta Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam," June 27, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12570632>.

²⁴ Erwin Gunawan Hutapea, "Peran Bank Indonesia Bank Indonesia Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Dan Keuangan Berkelanjutan," February 25, 2025, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peran-bank-indonesia-bank-indonesia-dalam-mendorong-inklusi-keuangan-dan-keuangan-berkelanjutan-85ea4efa/detail>.

²⁵ Riady Ibnu Khaldun, Ratna Sari, and Andi Ismira, "Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam Konteks Perang Dagang," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 2 (August 3, 2023): 68–81, <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27661>.

Ketiga, penerapan QRIS dan GPN juga berpotensi mengurangi biaya transaksi. Dengan sistem pembayaran yang lebih efisien, biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat berkurang. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing di pasar. Dalam konteks negosiasi tarif, semakin rendah biaya transaksi, semakin besar peluang untuk mengurangi harga jual, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Keempat, masalah mursalah dalam penerapan QRIS dan GPN juga dapat dilihat dari segi dampak sosial. Dengan meningkatnya aksesibilitas dan efisiensi sistem pembayaran, terdapat potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dapat lebih mudah melakukan transaksi, berinvestasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh PBB, yang menekankan pentingnya inklusi sosial dan ekonomi²⁶.

Akhirnya, penerapan masalah mursalah dalam konteks negosiasi tarif juga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan data dan analisis yang dihasilkan dari sistem pembayaran digital, pemerintah dapat mengidentifikasi tren dan kebutuhan pasar, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan tarif dan perdagangan internasional. Ini menunjukkan bahwa penerapan QRIS dan GPN tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga pada kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan masalah mursalah melalui QRIS dan GPN dalam konteks negosiasi tarif Trump memberikan dampak yang luas dan signifikan bagi ekonomi Indonesia, mulai dari peningkatan inklusi keuangan hingga pengurangan biaya transaksi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran QRIS dan GPN dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi dan Keuangan di Tengah Ketidakpastian Global yang Ditimbulkan oleh Kebijakan Tarif

Dalam konteks ketidakpastian global, terutama yang disebabkan oleh kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump, sistem pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Global Payment Network) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan. QRIS, yang diadopsi secara luas di Indonesia, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada kuartal pertama tahun 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 56,3 juta dengan volume transaksi sebesar 2,6 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat

²⁶ Ahmad Noval, "Apa itu Sustainable Development Goals, berikut penjelasannya!," *Universitas Muhammadiyah Jakarta* (blog), April 16, 2025, https://umj.ac.id/just_info/apa-itu-sustainable-development-goals-berikut-penjasannya/.

semakin terbuka terhadap inovasi dalam sistem pembayaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. QRIS berfungsi sebagai alat yang memudahkan transaksi, terutama di sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dengan semakin banyaknya merchant yang menggunakan QRIS, yang mencapai 38,1 juta, hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha. Ketika kebijakan tarif menyebabkan ketidakpastian di pasar internasional, QRIS membantu memperkuat ekonomi lokal dengan mendorong konsumen untuk berbelanja di dalam negeri. Data menunjukkan bahwa transaksi digital meningkat sebesar 33,50% pada kuartal I 2025, yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih ke metode pembayaran yang lebih aman dan cepat, mengurangi ketergantungan pada mata uang asing.

Di sisi lain, GPN juga berkontribusi signifikan dalam stabilitas ekonomi. Dengan volume transaksi pembayaran digital yang mencapai 10,76 miliar transaksi pada kuartal pertama tahun 2025, GPN menciptakan jaringan pembayaran yang lebih terintegrasi dan efisien. Hal ini memungkinkan transaksi lintas platform yang lebih mudah dan cepat, bahkan dalam kondisi pasar yang tidak stabil akibat kebijakan luar negeri yang berubah-ubah. GPN memberikan solusi yang membantu pelaku bisnis untuk tetap beroperasi secara efektif, meskipun ada tantangan dari luar²⁷. Stabilitas yang diberikan oleh QRIS dan GPN juga dapat dilihat dari aspek pengurangan biaya transaksi. Dengan menggunakan sistem pembayaran digital, biaya yang biasanya dikeluarkan untuk transaksi tunai dapat diminimalisir. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha yang dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan usaha mereka. Dalam konteks ini, QRIS dan GPN tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai pendorong efisiensi ekonomi yang lebih luas.

Akhirnya, dalam menghadapi ketidakpastian global yang diakibatkan oleh kebijakan tarif Trump, QRIS dan GPN menunjukkan bahwa inovasi dalam sistem pembayaran dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transaksi, kedua sistem ini berpotensi untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi global dan membantu masyarakat serta pelaku usaha untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

²⁷ Nadiyah Rahmalia, "GPN (Gerbang Pembayaran Nasional): Definisi, Manfaat, dan Plus Minusnya," *Paper.id | Informasi Terbaru Seputar Bisnis dan Akuntansi* (blog), January 22, 2025, <https://www.paper.id/blog/smb/gpn-gerbang-pembayaran-nasional-adalah/>.

PENUTUP

Kebijakan tarif yang diterapkan mantan Presiden AS Donald Trump berdampak luas pada perdagangan global dan turut memengaruhi sistem pembayaran digital di Indonesia. Dalam konteks ini, QRIS dan GPN muncul sebagai solusi strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Pada kuartal I 2025, pengguna QRIS mencapai 56,3 juta dengan 2,6 miliar transaksi, sementara merchant meningkat menjadi 38,1 juta. GPN juga mencatat 10,76 miliar transaksi, tumbuh 33,50% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital yang efisien, aman, dan inklusif.

Melalui prinsip masalah mursalah, QRIS dan GPN tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan, mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, serta meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap ketidakpastian global. Dengan dukungan dan pengembangan berkelanjutan, kedua sistem ini berpotensi menjadi pilar penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

REFERENCES

- Ahmed, Saeed. "REALISTIC VIEW ON TRADE WARS: US-CHINA TRADE CONFLICT & IMPACT ON EMERGING ECONOMIES." *Journal of Public Administration, Finance and Law* 29 (2023): 46-60. <https://doi.org/10.47743/jopafl-2023-29-04>.
- Andhika, Muchammad Milladi, Mintarti Ariani, and Bambang Budiarto. "Tantangan Perkembangan Teknologi melalui Metode Pembayaran QRIS bagi UMKM dan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 9, no. 1 (March 15, 2025): 1522-39. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5233>.
- Apa Itu Sistem Pembayaran GPN? Ini Kelebihan dan Kekurangannya, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NleC805R-apa-itu-sistem-pembayaran-gpn-ini-kelebihan-dan-kekurangannya>.
- Berliana Simanjuntak, Aura Permata Putri. "Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Dalam Mendukung Penjualan di Era Digital," November 20, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14192809>.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. Los Angeles, 2018.
- Firdaus, Haris. "Memahami Dampak Kebijakan Tarif Trump terhadap Perekonomian Indonesia." *Kompas.id*, April 9, 2025.

- <https://www.kompas.id/artikel/memahami-dampak-kebijakan-tarif-trump-terhadap-perekonomian-indonesia>.
- Handayani, Nugrah Leksono Putri. "Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 1, no. 3 (September 30, 2023): 363–70. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.752>.
- Hutapea, Erwin Gunawan. "Peran Bank Indonesia Bank Indonesia Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Dan Keuangan Berkelanjutan," February 25, 2025. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peran-bank-indonesia-bank-indonesia-dalam-mendorong-inklusi-keuangan-dan-keuangan-berkelanjutan-85ea4efa/detail>.
- Ibnu Khaldun, Riady, Ratna Sari, and Andi Ismira. "Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam Konteks Perang Dagang." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 2 (August 3, 2023): 68–81. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27661>.
- Keterbatasan Infrastruktur Jadi Tantangan Pengembangan Transaksi QRIS, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrJvg-keterbatasan-infrastruktur-jadi-tantangan-pengembangan-transaksi-qris>.
- Kilas Balik Perang Dagang Pertama Trump dan Kenapa Dianggap Gagal, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCg6wM-kilas-balik-perang-dagang-pertama-trump-dan-kenapa-dianggap-gagal>.
- Kwartama, Agung, Paiman, Sumiyatiningsih, and Akhmad Sopani. "Implikasi Pembatasan Global Pada Jaringan Transportasi Laut dan Logistik Dalam Perdagangan Internasional di Indonesia: Implications of Global Restrictions on Maritime Transport and Logistics Networks in International Trade in Indonesia." *Jurnal Matemar: Manajemen dan Teknologi Maritim* 4, no. 2 (April 20, 2025). <https://doi.org/10.59225/6a0yk933>.
- Maharani, Dian Putri, Nazihah Romiza, Esti Pasaribu, and Ratu Eva Febriani. "Pengaruh Digital Payment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kawasan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19." *Ecoplan* 6, no. 2 (October 30, 2023): 145–54. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i2.676>.
- Muhammad Sultan Mandalika and Vanessa Debora Muaja. "Analisis Hukum terhadap Dampak Pengenaan Tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap Perdagangan Indonesia: Tinjauan Perjanjian Perdagangan Internasional dan Kebijakan Ekonomi." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (April 14, 2025): 173–87. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1285>.
- Noval, Ahmad. "Apa itu Sustainable Development Goals, berikut penjelasannya!" Universitas Muhammadiyah Jakarta (blog), April 16,

2025. https://umj.ac.id/just_info/apa-itu-sustainable-development-goals-berikut-penjelasan/.
- Purwanti, Agustina. "QRIS dalam Sorotan Negosiasi Tarif Trump, Akankah Indonesia Mengalah?" Kompas.id, April 23, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/qr-is-dalam-sorotan-negosiasi-tarif-trump-akankan-indonesia-mengalah>.
- QRIS, InterActive. "Ditekan AS, Transaksi QRIS Ternyata Meroket 169%! Bukti Ketangguhan Ekonomi Digital Indonesia," April 24, 2025. <https://qr.is.interactive.co.id/homepage/blog-detail?lang=en&page=OTQ=-ditekan-as-transaksi-qr-is-ternyata-meroket-169%-bukti-ketangguhan-ekonomi-digital-indonesia>.
- . "Jadi CATATAN Amerika, QRIS Justru Semakin Menggila," Mei 2025. <https://qr.is.interactive.co.id/homepage/blog-detail?lang=id&page=MTM0&jadi-catatan-amerika-qr-is-justru-semakin-menggila>.
- . "QRIS - Proses Step by Step Mendapatkan QRIS Dari Registrasi Sampai Cetak QRIS," June 21, 2025. <https://qr.is.interactive.co.id/homepage/qr-is-proses-step-by-step?lang=id>.
- Rahmalia, Nadiyah. "GPN (Gerbang Pembayaran Nasional): Definisi, Manfaat, dan Plus Minusnya." Paper.id | Informasi Terbaru Seputar Bisnis dan Akuntansi (blog), January 22, 2025. <https://www.paper.id/blog/smb/gpn-gerbang-pembayaran-nasional-adalah/>.
- Ratna R, Neni Hardiati. "Aplikasi Masalah Mursalah dalam Perekonomian Islam serta Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam," June 27, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12570632>.
- rexy. "Dampak Kebijakan Tarif Impor Trump Terhadap Ekspor Indonesia: Tantangan dan Solusi." GRC Indonesia (blog), May 10, 2025. <https://grc-indonesia.com/artikel/dampak-kebijakan-tarif-impor-trump-terhadap-ekspor-indonesia-tantangan-dan-solusi/>.
- Sonar, Dataxet. "Bank Tradisional di Era Digital: Menemukan Kekuatan Baru!," May 15, 2023. <https://sonarplatform.com/id/memuat-ulang-perbankan-bagaimana-bank-tradisional-beradaptasi-dengan-lanskap-digital/>.
- Sri Astuti, Muhammad Rehan. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer," October 25, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13990431>.
- Sulistyawati, Retno. "Pemerintah Diminta Tidak Menuruti Protes AS soal Penggunaan QRIS | tempo.co." Tempo, Mei | 18.00 WIB 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-diminta-tidak-menuruti-protes-as-soal-penggunaan-qr-is-1334472>.

Supriyanto, Benny Eko. "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi lewat KUR dan Insentif UMKM," December 9, 2024. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>.

Suryanto, Suryanto, and R. Ratna Meisa Dai. "Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 13, no. 1 (May 9, 2025): 96–110. <https://doi.org/10.34010/hnta2869>.